

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa FISIP Unsoed mengenai pemanfaatan media sosial Twitter untuk *speak up* korban kekerasan seksual di kampus. Hasil analisis menunjukkan bahwa media sosial, khususnya Twitter, memainkan peran signifikan sebagai ruang alternatif bagi korban kekerasan seksual di lingkungan kampus untuk *speak-up*. Mahasiswa FISIP Unsoed memandang Twitter sebagai medium yang dapat memberikan jangkauan luas, dukungan emosional, dan tekanan publik yang mendorong tindak lanjut lebih cepat terhadap kasus. Fenomena ini dinilai dapat memperkuat solidaritas digital dan memperluas kesadaran kolektif terhadap isu kekerasan seksual.

Meskipun demikian, persepsi mahasiswa juga menunjukkan adanya ambivalensi. Yakni di satu pihak, *speak-up* di Twitter dianggap sebagai bentuk keberanian dan penguatan posisi korban. Di sisi lain, media sosial dinilai memiliki risiko tersendiri, seperti penyebaran informasi yang belum terverifikasi, potensi reviktimisasi, serta tekanan sosial yang dapat menghambat keberanian korban lain untuk bersuara.

Selain itu, ketidakpercayaan terhadap mekanisme formal penanganan kekerasan seksual, baik satgas kampus maupun aparat hukum, menjadi alasan mengapa banyak korban lebih memilih menyuarakan pengalamannya di ruang digital. Temuan ini menegaskan pentingnya pembenahan sistem dukungan formal dan perlunya penciptaan ruang aman baik secara daring maupun luring. Dengan demikian, persepsi mahasiswa terhadap fenomena *speak-up* di Twitter menunjukkan bahwa media sosial berpotensi menjadi alat advokasi dan pemulihan, namun tetap membutuhkan pendampingan, verifikasi informasi, serta penguatan sistem perlindungan korban yang lebih holistik dan responsif.

B. Rekomendasi

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan keterbatasan untuk menjawab bagaimana persepsi mahasiswa FISIP Unsoed mengenai pemanfaatan media sosial Twitter untuk *Speak-Up* korban kekerasan seksual di kampus. Keterbatasan dalam ruang lingkup (*scope*) pada penelitian ini mencakup waktu penelitian yang singkat, lingkup responden yang terbatas, dan variabel penelitian meliputi faktor-faktor yang diukur atau diamati dalam penelitian.

Selain keterbatasan lingkup penelitian, terdapat pula faktor pemantik yang muncul dari temuan lapangan, yaitu adanya indikasi variabel-variabel tertentu yang berpotensi memengaruhi persepsi, seperti: efektivitas *speak-up* di media sosial Twitter, faktor diam korban kekerasan seksual, tingkat kepercayaan terhadap pelaporan formal. Penelitian ini belum menguji hubungan atau pengaruh variabel-variabel tersebut secara statistik karena menggunakan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan metode kuantitatif sangat direkomendasikan untuk mengukur secara lebih objektif hubungan antarvariabel tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terukur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi persepsi mahasiswa.

Meski demikian, penelitian ini memiliki kelebihan, yakni fokus pada isu yang relatif baru dan relevan, memanfaatkan pendekatan kualitatif yang mampu menggali persepsi secara mendalam, serta memberikan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan oleh kampus dan pemangku kepentingan terkait.

Berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa rekomendasi yang peneliti ajukan, yakni edukasi berkelanjutan bagi mahasiswa terkait etika bermedia sosial, khususnya dalam merespons kasus kekerasan seksual. Hal ini penting untuk meminimalisir reviktimisasi, penyebaran hoaks, dan komentar yang menyudutkan korban.

Selain edukasi, pemanfaatan media digital juga menjadi poin penting dalam menciptakan ruang aman bagi korban. Twitter terbukti menjadi ruang potensial untuk *speak-up* sehingga perlu didorong pemanfaatannya secara lebih bijak. Kampus dan organisasi kemahasiswaan dapat bekerja sama menciptakan ekosistem digital yang mendukung korban untuk bersuara tanpa takut akan stigma dan tekanan sosial.

Upaya tersebut perlu dibarengi dengan pembenahan mekanisme formal penanganan kasus di tingkat kampus. Rendahnya kepercayaan terhadap mekanisme formal menandakan perlunya transparansi, sosialisasi, serta peningkatan kapasitas Satgas PPKS agar lebih responsif, terpercaya, dan mudah diakses oleh mahasiswa yang ingin melapor.

Di sisi lain, dukungan bagi korban tidak hanya bersifat internal kampus, tetapi juga memerlukan jejaring eksternal yang solid. Perlu dibangun kolaborasi antara institusi pendidikan, LSM, dan komunitas digital untuk mendukung advokasi korban kekerasan seksual, termasuk pendampingan psikologis dan hukum bagi korban yang *speak-up* di media sosial.

Yang terakhir adalah kampus dapat menyusun panduan atau protokol aman bagi korban kekerasan seksual yang memilih *speak-up* secara daring, agar tidak menimbulkan dampak negatif lebih lanjut bagi korban maupun proses hukum yang berjalan.

